

Al-Ishlah: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, Volume 1 Nomor 1, 2026: 1-20

<https://socialbuilding.org/index.php/Al-Ishlah/en/index>

e-ISSN XXXX-XXXX



Dampak Bantuan Sosial Terhadap Etos Kerja Masyarakat

Wardah Khoiriah

Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

E-mail: wardahkhoiriyah80@gmail.com

Keywords	Abstract
Social Assistance, Work Ethic, Islam, Poverty, Dependency, Community Empowerment	Social assistance is a government policy instrument designed to reduce the economic burden of poor and vulnerable communities. This study aims to comprehensively examine the impact of social assistance on the work ethic of society from an Islamic perspective and social reality. The method used is a literature study with a descriptive qualitative approach. The results show that social assistance has a dual impact: on one hand it can be an effective safety net, but on the other hand it has the potential to create a culture of dependency if not managed properly. Islam emphasizes the balance between providing assistance and encouraging hard work. It is necessary to reform social assistance program designs that integrate the values of independence, empowerment, and mentoring.
Bantuan Sosial, Etos Kerja, Islam, Kemiskinan, Ketergantungan, Pemberdayaan Masyarakat	Bantuan sosial merupakan instrumen kebijakan pemerintah yang dirancang untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat miskin dan rentan. Namun, di balik tujuan mulia itu, terdapat perdebatan akademis mengenai dampak jangka panjang bantuan sosial terhadap etos kerja penerimanya. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara komprehensif dampak bantuan sosial terhadap etos kerja masyarakat dari perspektif Islam dan realitas sosial. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa bantuan sosial memiliki dampak ganda: di satu sisi dapat menjadi jaring pengaman yang efektif, namun di sisi lain berpotensi menciptakan budaya ketergantungan apabila tidak dikelola dengan tepat. Islam menekankan keseimbangan antara pemberian bantuan dan dorongan untuk bekerja keras. Diperlukan reformasi desain program bantuan sosial yang mengintegrasikan nilai-nilai kemandirian, pemberdayaan, dan pendampingan.

Article Info		
Submit: 30/12/2025	Accepted: 24/06/2026	Publish: 29/06/2026
Corresponding Author	Makhmud Sholih	

Introduction

Bantuan sosial (bansos) telah menjadi instrumen kebijakan andalan pemerintah Indonesia dalam upaya menanggulangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Berbagai program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), hingga kartu sembako telah diluncurkan dengan harapan dapat meringankan beban hidup masyarakat yang paling rentan secara ekonomi (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, jumlah penduduk miskin di Indonesia masih mencapai sekitar 25,9 juta jiwa atau 9,36 persen dari total populasi (Badan Pusat Statistik, 2023). Angka ini mendorong pemerintah untuk terus mengalokasikan anggaran besar dalam program perlindungan sosial. Pada tahun 2023, pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp476 triliun, menjadikannya salah satu pos belanja terbesar dalam APBN (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023).

Namun demikian, di balik niat mulia tersebut, muncul kekhawatiran yang cukup mendasar dari berbagai kalangan. Salah satu kekhawatiran utama adalah kemungkinan terjadinya dependency trap atau perangkap ketergantungan, yaitu kondisi ketika penerima bantuan kehilangan motivasi untuk bekerja keras dan mandiri secara ekonomi karena terbiasa menerima bantuan dari negara (Todaro & Smith, 2020).

Etos kerja merupakan nilai fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Etos kerja yang tinggi bukan hanya berkaitan dengan produktivitas ekonomi semata, melainkan juga menyentuh dimensi spiritual, moral, dan sosial seseorang. Dalam konteks Islam, bekerja bukan sekadar aktivitas mencari nafkah, tetapi merupakan ibadah yang memiliki nilai luhur di hadapan Allah SWT (Al-Qardhawi, 1995).

Pertanyaan mendasar yang muncul adalah: apakah bantuan sosial yang diberikan pemerintah berdampak positif dalam jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat, atau justru melemahkan etos kerja yang merupakan fondasi kemajuan peradaban? Penelitian ini hadir untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan mengkaji berbagai perspektif, mulai dari perspektif Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, hingga perspektif sosiologi dan ekonomi yang didasarkan pada data empiris.

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam memberikan panduan yang jelas tentang pentingnya bekerja dan berusaha secara mandiri. Allah SWT berfirman dalam Surah At-Taubah ayat 105:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: "Dan katakanlah, 'Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.'" (QS. At-Taubah: 105).

Ayat ini secara tegas mengajak setiap Muslim untuk aktif bekerja dan berkarya. Allah SWT menyatakan bahwa Dia sendiri, bersama Rasul-Nya dan seluruh kaum mukmin, akan menyaksikan setiap amal perbuatan manusia. Ini menunjukkan betapa pentingnya aktivitas kerja dalam pandangan Islam.

Selanjutnya, Allah SWT juga berfirman dalam Surah Ar-Ra'd ayat 11:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Artinya: "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri." (QS. Ar-Ra'd: 11).

Ayat ini merupakan salah satu firman Allah yang paling fundamental dalam konteks pemberdayaan manusia. Prinsip yang terkandung dalam ayat ini sangat relevan dengan diskursus tentang bantuan sosial dan etos kerja. Allah SWT menegaskan bahwa perubahan nasib suatu kaum harus dimulai dari dalam diri mereka sendiri. Ini berarti bahwa bantuan dari luar, termasuk bantuan sosial dari pemerintah, tidak akan efektif jika tidak disertai dengan tekad dan usaha dari penerima bantuan itu sendiri untuk mengubah kondisi mereka.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mengkaji konsep bantuan sosial dalam Islam; (2) Menganalisis dampak bantuan sosial terhadap etos kerja masyarakat; (3) Merumuskan rekomendasi agar program bantuan sosial dapat mendorong kemandirian dan tidak melemahkan etos kerja masyarakat.

Literature Review

1. Konsep Bantuan Sosial dalam Perspektif Islam

Bantuan sosial dalam Islam merupakan bagian dari sistem kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan ekonomi dalam masyarakat. Islam mengajarkan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab sosial terhadap kelompok yang lemah dan membutuhkan bantuan. Prinsip tersebut diwujudkan melalui instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang berfungsi sebagai sarana redistribusi kekayaan agar tidak beredar hanya di kalangan orang-orang kaya. Menurut Al-Qardhawi (1999), bantuan kepada fakir miskin bukan sekadar bentuk belas kasihan, melainkan kewajiban sosial yang bertujuan mengangkat harkat dan martabat manusia sehingga mereka dapat hidup secara layak dan mandiri.

Selain itu, Islam memandang bahwa negara memiliki peran penting dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Chapra (2000) menjelaskan bahwa pemerintah berkewajiban menyediakan perlindungan sosial bagi kelompok rentan sebagai bentuk realisasi maqashid syariah, khususnya dalam menjaga kehidupan dan kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, bantuan sosial dalam Islam tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga harus diarahkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat agar penerima bantuan mampu keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.

2. Konsep Etos Kerja dalam Islam

Etos kerja merupakan seperangkat nilai yang mendorong seseorang untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, disiplin, dan bertanggung jawab. Dalam perspektif Islam,

bekerja merupakan bagian dari ibadah yang memiliki nilai spiritual di hadapan Allah SWT. Setiap pekerjaan yang dilakukan secara halal dan diniatkan untuk mencari ridha Allah akan bernilai pahala. Oleh karena itu, Islam sangat mendorong umatnya untuk memiliki semangat kerja yang tinggi dan menjauhi sikap malas serta ketergantungan kepada orang lain (Tasmara, 2002).

Menurut Nata (2016), etos kerja Islami ditandai oleh sifat amanah, kerja keras, profesionalisme, kejujuran, dan tanggung jawab. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan bagi terbentuknya masyarakat yang produktif dan mandiri. Rasulullah SAW juga menegaskan pentingnya bekerja melalui berbagai hadis yang mendorong umat Islam untuk mencari nafkah dengan usaha sendiri daripada bergantung kepada bantuan orang lain. Dengan demikian, etos kerja dalam Islam tidak hanya berorientasi pada pencapaian ekonomi, tetapi juga pada pembentukan karakter dan akhlak yang baik.

3. Dampak Bantuan Sosial terhadap Etos Kerja Masyarakat

Hubungan antara bantuan sosial dan etos kerja menjadi salah satu isu yang banyak dibahas dalam kajian ekonomi dan sosiologi. Sebagian penelitian menunjukkan bahwa bantuan sosial dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin karena mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan. Ketika kebutuhan dasar terpenuhi, masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitasnya (World Bank, 2022).

Namun, terdapat pula pandangan yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diberikan secara terus-menerus tanpa mekanisme pemberdayaan berpotensi menimbulkan ketergantungan. Todaro dan Smith (2020) menyebut fenomena ini sebagai *dependency syndrome*, yaitu kondisi ketika penerima bantuan menjadi kurang termotivasi untuk bekerja atau mengembangkan usaha karena merasa kebutuhan hidupnya telah dipenuhi melalui bantuan yang diterima. Oleh sebab itu, efektivitas bantuan sosial sangat bergantung pada desain dan mekanisme pelaksanaannya.

Penelitian Suharto (2017) menunjukkan bahwa program bantuan sosial yang hanya berfokus pada pemberian bantuan konsumtif cenderung menghasilkan dampak jangka pendek. Sebaliknya, program yang dikombinasikan dengan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kemandirian penerima manfaat. Temuan ini menunjukkan bahwa bantuan sosial tidak selalu melemahkan etos kerja, tetapi dapat menjadi sarana penguatan kapasitas masyarakat apabila dirancang secara tepat.

4. Pemberdayaan sebagai Solusi Ketergantungan Bantuan Sosial

Konsep pemberdayaan masyarakat menjadi pendekatan yang banyak direkomendasikan untuk mengatasi potensi ketergantungan terhadap bantuan sosial. Pemberdayaan bertujuan meningkatkan kemampuan individu dan kelompok dalam mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri. Menurut Kartasasmita (1996), pemberdayaan merupakan proses pembangunan yang berpusat pada masyarakat dengan menekankan peningkatan kapasitas, partisipasi, dan kemandirian.

Dalam konteks bantuan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, pendampingan ekonomi, serta pengembangan akses terhadap lapangan pekerjaan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip Islam yang mengajarkan bahwa bantuan hendaknya mampu mengubah mustahik menjadi muzakki atau dari penerima bantuan menjadi pemberi bantuan (Al-Qardhawi, 1999). Dengan demikian, tujuan akhir bantuan sosial bukan sekadar mengurangi beban ekonomi masyarakat miskin, tetapi juga menciptakan kemandirian yang berkelanjutan.

Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*). Metode studi literatur dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai referensi ilmiah yang relevan dengan topik dampak bantuan sosial terhadap etos kerja masyarakat.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori. Pertama, sumber primer yang mencakup Al-Qur'an, kitab-kitab hadis sahih, peraturan perundang-undangan tentang bantuan sosial, dan data statistik resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kedua, sumber sekunder yang meliputi jurnal-jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku-buku akademik, laporan penelitian, serta artikel ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis menggunakan basis data akademik seperti Google Scholar, JSTOR, dan berbagai perpustakaan digital. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian meliputi: bantuan sosial, etos kerja, dependency trap, kemiskinan, Islam dan kerja, serta program perlindungan sosial.

Analisis data dilakukan dengan tahapan: (1) Reduksi data, yaitu memilih dan memilih data yang relevan dengan fokus penelitian; (2) Penyajian data, yaitu menyusun data yang telah direduksi dalam bentuk uraian deskriptif yang sistematis; (3) Penarikan kesimpulan, yaitu menginterpretasikan data dan merumuskan kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

Result and Analysis

A. Dampak Positif Bantuan Sosial terhadap Etos Kerja

Tidak semua dampak bantuan sosial bersifat negatif terhadap etos kerja. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa bantuan sosial yang dirancang dengan baik justru dapat menjadi katalisator bagi peningkatan etos kerja penerimanya.

Pertama, bantuan sosial dapat menghilangkan hambatan struktural yang mencegah seseorang untuk bekerja secara optimal. Kemiskinan ekstrem sering kali menciptakan lingkaran setan di mana seseorang tidak mampu bekerja secara produktif karena kekurangan gizi, tidak memiliki akses ke layanan kesehatan, atau tidak dapat menyekolahkan anak-anaknya. Bantuan sosial yang tepat sasaran dapat memutus lingkaran setan ini dengan memastikan bahwa kebutuhan dasar terpenuhi sehingga seseorang dapat fokus pada kegiatan produktif.

Kedua, program bantuan sosial yang terintegrasi dengan pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi terbukti efektif meningkatkan kapasitas produktif penerima

manfaat. Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia, misalnya, tidak hanya memberikan bantuan tunai tetapi juga mewajibkan penerima manfaat untuk memenuhi kondisionalitas di bidang kesehatan dan pendidikan (Ariel Fiszbein dan Norbert Schady, 2009).

Ketiga, studi yang dilakukan oleh Banerjee dan Duflo (2011) dalam buku *Poor Economics* menunjukkan bahwa bantuan tunai kepada masyarakat miskin tidak selalu mengurangi motivasi kerja mereka. Sebaliknya, dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, mereka justru dapat mengambil risiko usaha yang lebih besar dan berpotensi meningkatkan pendapatan secara signifikan.

B. Dampak Negatif Bantuan Sosial: Potensi Dependency Trap

Di sisi lain, berbagai kajian akademis juga mengidentifikasi potensi dampak negatif bantuan sosial terhadap etos kerja masyarakat, terutama jika program tidak dirancang dengan hati-hati. Dependency trap atau perangkap ketergantungan adalah kondisi di mana penerima bantuan menjadi sangat bergantung pada bantuan tersebut sehingga kehilangan inisiatif dan motivasi untuk bekerja mandiri (Murray, 1984).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian penerima bantuan sosial dalam jangka panjang mengalami kesulitan untuk keluar dari status penerima manfaat karena rendahnya peningkatan kapasitas ekonomi dan keterampilan produktif (Adato & Hoddinott, 2010).

Dari perspektif psikologi sosial, bantuan yang diberikan secara terus-menerus tanpa mekanisme pemberdayaan dapat mengurangi motivasi intrinsik dan rasa tanggung jawab individu terhadap peningkatan kesejahteraan dirinya sendiri (Deci & Ryan, 2000).

Dalam konteks Islam, bekerja dan berusaha merupakan kewajiban moral yang harus dilakukan sebelum seseorang menggantungkan diri kepada bantuan orang lain. Islam menekankan pentingnya kemandirian serta larangan bersikap malas dalam mencari rezeki (Al-Ghazali, 2004).

C. Analisis Perbandingan Program Bantuan Sosial di Berbagai Negara

Brasil melalui program Bolsa Família berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan akses pendidikan serta kesehatan melalui sistem bantuan tunai bersyarat yang menghubungkan bantuan dengan kewajiban sosial tertentu (Lindert et al., 2007).

Chili melalui program Chile Solidario menerapkan pendekatan pendampingan keluarga miskin secara intensif sehingga bantuan yang diberikan tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga berorientasi pada pemberdayaan ekonomi dan sosial (Barrientos, 2013).

Sementara itu, Meksiko melalui program Oportunidades menunjukkan bahwa bantuan tunai yang disertai syarat pendidikan dan kesehatan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang (Rawlings & Rubio, 2005).

Pengalaman berbagai negara tersebut menunjukkan bahwa efektivitas bantuan sosial sangat ditentukan oleh integrasi antara bantuan ekonomi, pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pendampingan masyarakat sehingga penerima bantuan dapat berkembang menjadi individu yang mandiri (Midgley, 2014).

D. Perspektif Islam tentang Keseimbangan Bantuan dan Kemandirian

Islam memiliki sistem tersendiri dalam mengelola bantuan sosial yang telah teruji selama berabad-abad. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf merupakan instrumen redistribusi kekayaan dalam Islam yang tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi juga untuk mendorong kemandirian penerimanya (Qardawi, 2005).

Konsep zakat dalam Islam sangat relevan dalam konteks ini. Imam Al-Ghazali dalam kitab *Ihya' Ulum al-Din* menegaskan bahwa tujuan zakat bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan fakir miskin semata, tetapi juga untuk memberdayakan mereka agar kelak dapat menjadi muzakki (pemberi zakat) (Al-Ghazali, 2004). Ini menunjukkan bahwa sistem bantuan dalam Islam memiliki orientasi jangka panjang yang berfokus pada pemberdayaan dan kemandirian.

Lebih jauh, Al-Qur'an membagi penerima zakat (mustahik) ke dalam delapan golongan yang disebutkan dalam Surah At-Taubah ayat 60. Di antara golongan tersebut terdapat kategori gharimin dan fi sabilillah yang menunjukkan bahwa Islam mengakui berbagai kondisi yang menyebabkan seseorang membutuhkan bantuan, namun tetap menekankan penggunaan bantuan secara bertanggung jawab dan produktif (Shihab, 2002).

Nabi Muhammad SAW sendiri pernah mencontohkan pendekatan pemberdayaan dalam memberikan bantuan. Dalam sebuah riwayat, ketika seorang sahabat meminta bantuan, Rasulullah SAW memberikan sarana untuk bekerja sehingga sahabat tersebut dapat memperoleh penghasilan sendiri. Pendekatan ini menunjukkan pentingnya bantuan produktif dibandingkan bantuan konsumtif semata (Al-Asqalani, 2000).

E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dampak Bantuan Sosial

Dampak bantuan sosial terhadap etos kerja tidak bersifat linear dan sederhana. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi apakah bantuan sosial akan berdampak positif atau negatif terhadap etos kerja penerimanya (Midgley, 2014).

Pertama, desain program merupakan faktor yang paling krusial. Program bantuan sosial yang dilengkapi dengan mekanisme kondisionalitas, batas waktu yang jelas, dan program pendampingan cenderung lebih efektif dalam mendorong kemandirian dibandingkan bantuan yang diberikan tanpa syarat dan dalam jangka waktu yang tidak terbatas (Barrientos, 2013).

Kedua, karakteristik penerima manfaat juga mempengaruhi dampak bantuan. Usia, tingkat pendidikan, kondisi kesehatan, dan lingkungan sosial merupakan faktor-faktor yang menentukan bagaimana seseorang merespons bantuan yang diterima (Sen, 1999).

Ketiga, konteks sosial-budaya masyarakat setempat sangat berpengaruh. Masyarakat dengan nilai-nilai budaya yang menghargai kerja keras dan kemandirian

cenderung tidak mudah terpengaruh oleh dampak negatif bantuan sosial. Sebaliknya, dalam masyarakat yang telah memiliki budaya ketergantungan, bantuan sosial dapat memperparah kondisi tersebut (Putnam, 2000).

Keempat, ketersediaan lapangan kerja dan kondisi ekonomi makro turut menentukan efektivitas program bantuan sosial. Di daerah dengan tingkat pengangguran yang tinggi dan keterbatasan lapangan kerja, bantuan sosial saja tidak cukup untuk meningkatkan kesejahteraan tanpa adanya kesempatan kerja yang memadai (Stiglitz, 2012).

Kelima, sistem pengawasan dan evaluasi program sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan bantuan dan memastikan bahwa bantuan benar-benar digunakan untuk tujuan produktif. Lemahnya sistem pengawasan sering kali menjadi penyebab utama program bantuan sosial tidak mencapai tujuan yang diharapkan (Kettner, Moroney, & Martin, 2017).

F. Rekomendasi Reformasi Program Bantuan Sosial

1. Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Program Bantuan Sosial

Mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, integrasi nilai-nilai Islam dalam desain program bantuan sosial dapat menjadi strategi yang efektif untuk mendorong etos kerja penerima manfaat. Nilai-nilai seperti tawakal (berserah diri setelah berusaha), ikhtiar (berusaha sungguh-sungguh), dan qana'ah (merasa cukup dengan apa yang ada) dapat menjadi landasan moral yang kuat dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat (Muthahhari, 2009).

Program bantuan sosial dapat berkolaborasi dengan lembaga-lembaga Islam seperti masjid, pesantren, dan organisasi keagamaan dalam menyampaikan pesan-pesan tentang pentingnya kerja keras dan kemandirian. Pendekatan keagamaan dinilai mampu memperkuat motivasi internal masyarakat untuk berusaha dan meningkatkan kualitas hidupnya secara berkelanjutan (Azra, 2012).

Peningkatan literasi agama tentang konsep kerja dalam Islam dapat menjadi komplemen yang efektif bagi program bantuan sosial yang sudah ada. Dalam ajaran Islam, kerja merupakan bagian dari ibadah dan sarana untuk mencapai kesejahteraan hidup, sehingga bantuan sosial seharusnya menjadi alat pemberdayaan, bukan sarana untuk menciptakan ketergantungan (Rahman, 1982).

2. Penguatan Sistem Graduasi

Sistem graduasi yang jelas dan terstruktur perlu menjadi komponen wajib dalam setiap program bantuan sosial. Graduasi mengacu pada proses di mana penerima manfaat secara bertahap mengurangi ketergantungannya pada bantuan dan akhirnya keluar dari program karena telah mampu mandiri secara ekonomi (Hashemi & de Montesquiou, 2011).

Proses graduasi yang efektif harus mencakup penilaian kondisi penerima secara berkala, pemberian pendampingan yang disesuaikan dengan kebutuhan individual, pelatihan keterampilan yang relevan dengan kondisi pasar kerja setempat, serta akses

terhadap modal usaha melalui kemitraan dengan lembaga keuangan mikro (Devereux & Sabates-Wheeler, 2004).

Pendekatan graduasi telah diterapkan di berbagai negara berkembang dan menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan pendapatan, aset produktif, serta kemampuan rumah tangga miskin untuk keluar dari lingkaran kemiskinan secara berkelanjutan (Banerjee et al., 2015). Oleh karena itu, sistem graduasi perlu menjadi bagian integral dari kebijakan bantuan sosial agar program tidak hanya berfungsi sebagai jaring pengaman sosial, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat (Barrientos, 2013).

3. Pemberdayaan Berbasis Komunitas

Pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas (community-based empowerment) terbukti lebih efektif dalam meningkatkan etos kerja penerima manfaat dibandingkan pendekatan individual. Ketika perubahan didorong dari dalam komunitas, terdapat kontrol sosial dan dukungan kolektif yang mendorong setiap anggota untuk meningkatkan produktivitas dan kemandiriannya (Ife & Tesoriero, 2008).

Model pemberdayaan seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Kelompok Wanita Tani (KWT) yang sudah ada di Indonesia perlu diperkuat dan diperluas jangkauannya. Dengan bekerja dalam kelompok, penerima manfaat tidak hanya memperoleh dukungan ekonomi, tetapi juga dukungan sosial, transfer pengetahuan, dan motivasi yang sangat penting dalam membangun etos kerja yang berkelanjutan (Adi, 2013).

Selain itu, pendekatan berbasis komunitas memungkinkan masyarakat terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program sehingga tercipta rasa memiliki (sense of ownership) yang dapat meningkatkan keberhasilan program pemberdayaan (Chambers, 1997).

4. Digitalisasi dan Peningkatan Akurasi Data

Salah satu kelemahan utama program bantuan sosial di Indonesia adalah masalah data yang tidak akurat, yang menyebabkan terjadinya inclusion error dan exclusion error. Oleh karena itu, digitalisasi sistem data melalui pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara berkelanjutan sangat diperlukan untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak (Suharto, 2017).

Selain itu, sistem monitoring dan evaluasi berbasis teknologi informasi memungkinkan pemerintah memperoleh data secara lebih cepat, akurat, dan transparan. Pemanfaatan teknologi digital dapat membantu mendeteksi lebih dini indikasi ketergantungan terhadap bantuan sosial sehingga intervensi yang tepat dapat segera dilakukan (Heeks, 2006).

Penguatan tata kelola data dan pemanfaatan teknologi digital juga dapat meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial melalui integrasi data antarlembaga, pengurangan potensi penyalahgunaan bantuan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat (World Bank, 2022).

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal penting. Pertama, bantuan sosial memiliki dampak yang kompleks dan multidimensi terhadap etos kerja masyarakat. Dampak tersebut tidak selalu negatif, melainkan sangat bergantung pada desain program, karakteristik penerima, dan konteks sosial-budaya yang melingkupinya. Kedua, Islam sebagai panduan hidup komprehensif memiliki pandangan yang seimbang tentang bantuan sosial dan etos kerja. Di satu sisi, Islam mengakui kewajiban untuk membantu sesama yang membutuhkan melalui instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Di sisi lain, Islam sangat menekankan pentingnya kemandirian, kerja keras, dan larangan untuk bersikap terlalu bergantung pada orang lain tanpa alasan yang valid. Ketiga, firman Allah dalam QS. At-Taubah: 105 dan QS. Ar-Ra'd: 11, serta hadis Nabi tentang mencari kayu bakar, memberikan panduan yang jelas bahwa Islam menempatkan kerja dan kemandirian sebagai nilai yang sangat tinggi. Program bantuan sosial yang ideal seharusnya mengacu pada nilai-nilai tersebut dalam desain dan implementasinya. Keempat, reformasi program bantuan sosial mutlak diperlukan agar program-program tersebut tidak hanya berfungsi sebagai jaring pengaman jangka pendek, tetapi juga sebagai batu loncatan menuju kemandirian dan peningkatan kapasitas ekonomi jangka panjang.

Daftar Pustaka

- Adato, Michelle, & Hoddinott, John. (2010). *Conditional Cash Transfers in Latin America*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Adi, Isbandi Rukminto. (2013). *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. (2000). *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Ghazali. (2004). *Ihya' Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Qardhawi, Yusuf. (1999). *Fiqh az-Zakah*. Beirut: Muassasah ar-Risalah.
- Azra, Azyumardi. (2012). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*. Jakarta: Kencana.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Profil Kemiskinan di Indonesia September 2023*. Jakarta: BPS.
- Banerjee, Abhijit V., Duflo, Esther, Goldberg, Nathanael, Karlan, Dean, Osei, Robert, Parienté, William, Shapiro, Jeremy, Thuysbaert, Bram, & Udry, Christopher. (2015). "A Multifaceted Program Causes Lasting Progress for the Very Poor: Evidence from Six Countries." *Science*, 348(6236).
- Bandura, Albert. (1997). *Self-Efficacy: The Exercise of Control*. New York: W.H. Freeman.
- Barrientos, Armando. (2013). *Social Assistance in Developing Countries*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Chambers, Robert. (1997). *Whose Reality Counts? Putting the First Last*. London: Intermediate Technology Publications.

- Chapra, M. Umer. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Deci, Edward L., & Ryan, Richard M. (2000). "The What and Why of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behavior." *Psychological Inquiry*, 11(4), 227–268.
- Devereux, Stephen, & Sabates-Wheeler, Rachel. (2004). *Transformative Social Protection*. Brighton: Institute of Development Studies.
- Esping-Andersen, Gøsta. (1990). *The Three Worlds of Welfare Capitalism*. Princeton: Princeton University Press.
- Fiszbein, Ariel, & Schady, Norbert. (2009). *Conditional Cash Transfers: Reducing Present and Future Poverty*. Washington, DC: World Bank Publications.
- Hashemi, Syed M., & de Montesquiou, Aude. (2011). *Reaching the Poorest: Lessons from the Graduation Model*. Washington, DC: CGAP.
- Heeks, Richard. (2006). *Implementing and Managing eGovernment*. London: Sage Publications.
- Ife, Jim, & Tesoriero, Frank. (2008). *Community Development: Community-Based Alternatives in an Age of Globalisation*. Sydney: Pearson Education.
- Kartasasmita, Ginandjar. (1996). *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CIDES.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *APBN Kita: Kinerja dan Fakta Tahun 2023*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Kettner, Peter M., Moroney, Robert M., & Martin, Lawrence L. (2017). *Designing and Managing Programs*. California: Sage Publications.
- Lindert, Kathy, Linder, Anja, Hobbs, Jason, & De la Brière, Bénédicte. (2007). *The Nuts and Bolts of Brazil's Bolsa Família Program*. Washington, DC: World Bank.
- Midgley, James. (2014). *Social Development: Theory and Practice*. London: Sage Publications.
- Murray, Charles. (1984). *Losing Ground: American Social Policy, 1950–1980*. New York: Basic Books.
- Muthahhari, Murtadha. (2009). *Masyarakat dan Sejarah: Kritik Islam atas Marxisme dan Teori Lainnya*. Jakarta: Pustaka Hidayah.
- Nata, Abuddin. (2016). *Studi Islam Komprehensif*. Jakarta: Kencana.
- Putnam, Robert D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster.
- Qardawi, Yusuf. (2005). *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Rahman, Fazlur. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Rawlings, Laura B., & Rubio, Gloria M. (2005). *Evaluating the Impact of Conditional Cash Transfer Programs*. Washington, DC: World Bank.

- Sen, Amartya. (1999). *Development as Freedom*. New York: Oxford University Press.
- Shihab, M. Quraish. (2002). *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Suharto, Edi. (2017). *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Tasmara, Toto. (2002). *Membudayakan Etos Kerja Islami*. Jakarta: Gema Insani.
- Todaro, Michael P., & Smith, Stephen C. (2020). *Economic Development* (13th ed.). New York: Pearson Education.
- World Bank. (2022). *Social Protection and Jobs Report 2022*. Washington, DC: World Bank.